

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Hartoyo, Edie. 2013. *Transportasi Pro Rakyat*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Hidayat, Taufik,. 2004. *Perkeretaapian Indonesia di Persimpangan Jalan*. YLKI. Jakarta.
- Hidayat, Taufik,. 2011. *Regulasi, Keselamatan dan Pelayanan Perkeretaapian Indonesia*. CV.Halimah. Bandung.
- Kartika, Sari Elsi dan Simangungsog Advendi. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Nasution, Az SH. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media. Jakarta.
- Simbolon, Maringan Masry. 2003. *Ekonomi Transportasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Shofie, Yusuf. 2009. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Salim, H.A.Abbas. 2013. *Manajemen Transportasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

### B. Jurnal, Makalah, Prosiding

- Proceeding Round Table Discussion, *Kebijakan Penghapusan Pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Kelas Ekonomi*, Kementerian Perhubungan Badan Litbang, Jakarta 2013 hal.I-1

### C. Media Online

Transportasi, ([www.id.wikipedia.org/wiki/transportasi](http://www.id.wikipedia.org/wiki/transportasi)) diakses tanggal 3 Mei 2014.

Mochamad Soef, “Pentingnya /peranan Transportasi Perkotaan dan Lingkungan,

(<http://soef47.wordpress.com/2009/11/01/pentingnya-peran-transportasi-perkotaan-dan-lingkungan>), diakses tanggal 03 Mei 2014.

Sekilas KRL, Sejarah KRL ([www.krl.co.id](http://www.krl.co.id)), diakses tanggal 12 April 2014

### D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322).